

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, KEMAKMURAN DAERAH DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh :
IDETA ADELIA RAHMADI
062140510375

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, KEMAKMURAN DAERAH DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh :
IDETA ADELIA RAHMADI
062140510375

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711)
353414 Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ideta Adelia Rahmadi
NPM : 062140510375
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIV Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,
Intergovernmental Revenue, Kemakmuran Daerah dan
Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana tersebut di atas beserta isinya merupakan hasil penulisan saya sendiri.
2. Skripsi tersebut bukan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari dinyatakan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain, maka saya bersedia menanggung konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui pihak pihak yang berkepentingan.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan



Ideta Adelia Rahmadi

NPM 062140510375



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TNGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id> Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

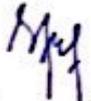
Nama : Ideta Adelia Rahmadi
NPM : 062140510375
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik
Mata Kuliah : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

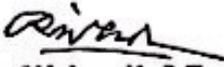
Telah diujikan pada Ujian Skripsi Tanggal 17 Juli 2025
Dihadapan Tim Penguji Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Negeri Sriwijaya

Palembang, 2025

Menyetujui,
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197804102005012020


Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak
NIP. 197007182001121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197104121998022001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: info@polsri.ac.id

PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI

Mahasiswa berikut:

Nama : Ideta Adelia Rahmadi
NIM : 062140510375
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D-IV Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Telah melaksanakan revisi terhadap Skripsi yang diujikan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Pelaksanaan revisi terhadap Skripsi tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi.

No	Komentar	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Penulisan pada hasil uji regresi data panel	Bainil Yulina, S.E., M.Si NIP 196107011989032001	25/07/2025	
2	-	Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak., CA NIP 197804102005012020	24/07/2025	
3	Tambahkan penjelasan pada saran no 2	Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak NIP 197007182001121001	21/07/2025	
4	Revisi sesuai catatan	Kurnia Widya Oktarini, S.E., M.Si NIP 199010182022032015	21/07/2025	

Palembang, 25 Juli 2025

Ketua Penguji

Bainil Yulina, S.E., M.Si
NIP 196107011989032001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, jika kamu terpilih berarti kamu yang mampu, Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 126)

“Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku”

(QS. Maryam: 4)

“Teruslah berusaha dan berdoa sampai kamu menemukan hadiah terbaikmu, karena sesungguhnya takdir terbaik adalah apa yang kamu jalani”

(Penulis)

Kupersembahkan Untuk:

- Mama dan Papa Tercinta
- Adik dan Keluarga Besar
- Sahabat – Sahabatku
- Kedua Dosen Pembimbing
- Almamaterku
- Teman – Teman Kelas 8 APA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Sejalan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir Irawan Rusnadi, M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Ibu Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M. Acc selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Ibu Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak selaku Pembimbing II Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maria, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik kelas 8 APA.

8. Bapak/Ibu dosen/Staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan membantu segala kepentingan perihal akademik dan administrasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Mama dan Papa tercinta, adik tersayang dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat, serta doa terbaik untuk keberhasilan penulis.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya teman-teman kelas 8 APA yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi bagi penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Palembang, 2025

Ideta Adelia Rahmadi

ABSTRAK

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Ideta Adelia Rahmadi, 2025 (xv+83 halaman)

Email : idgetaadelia08@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Objek penelitian yang digunakan adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (www.bpk.go.id) dan menggunakan metode regresi berganda menggunakan *software* Eviews 12. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara parsial, variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, variabel Kemakmuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah, *Leverage*, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

The Effect of Local Government Size, Intergovernmental Revenue, Regional Prosperity and Leverage on the Financial Performance of Regency / City Governments in South Sumatra Province

Ideta Adelia Rahmadi, 2025 (xv+83 pages)

Email : idetaadelia08@gmail.com

This study aims to determine the effect of Local Government Size, Intergovernmental Revenue, Regional Prosperity and Leverage on the Financial Performance of Regency / City Governments in South Sumatra Province. The research objects used were 17 regencies / cities in South Sumatra Province from 2019-2023. This research is a quantitative study that uses secondary data sourced from the official website of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (www.bpk.go.id) and uses multiple regression methods using Eviews 12 software. The results of data analysis show that Local Government Size, Intergovernmental Revenue, Regional Prosperity and Leverage simultaneously affect Local Government Financial Performance. While partially, the Local Government Size variable has a positive effect on the Financial Performance of the Regency / City Government in South Sumatra Province, the Intergovernmental Revenue variable has a negative effect on the Financial Performance of the Regency / City Government in South Sumatra Province, the Regional Prosperity variable has a positive effect on the Financial Performance of the Regency / City Government in South Sumatra Province and the Leverage variable has no effect on the Financial Performance of the Regency / City Government in South Sumatra Province.

Keywords : *Local Government Size, Intergovernmental Revenue, Regional Prosperity, Leverage, Financial Performance.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah.....	13
2.1.4 <i>Intergovernmental Revenue</i>	14
2.1.5 Kemakmuran Daerah	17
2.1.6 <i>Leverage</i>	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Penelitian	26

2.4	Hipotesis Penelitian	27
2.4.1	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.4.2	Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.4.3	Pengaruh Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
2.4.4	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	30
2.4.5	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Kemakmuran Daerah dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3	Variabel Penelitian	32
3.3.1	Variabel Dependen	32
3.3.2	Variabel Independen.....	33
3.3.3	Definisi Operasional Variabel	33
3.4	Populasi dan Sampel	37
3.4.1	Populasi.....	37
3.4.2	Sampel	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Teknik Analisis Data	39
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	39
3.6.2	Analisis Pemilihan Model.....	39
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.4	Analisis Model Terpilih.....	44
3.6.5	Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R²).....	45
3.6.6	Uji Hipotesis	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Hasil Penelitian	48
4.1.1	Statistik Deskriptif.....	48
4.1.2	Analisis Pemilihan Model	57

4.1.2.1 Uji Pemilihan Model.....	58
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	60
4.1.4 Analisis Model Terpilih.....	63
4.1.5 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R²).....	65
4.1.6 Uji Hipotesis	66
4.2 Pembahasan.....	68
4.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	68
4.2.2 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	69
4.2.3 Pengaruh Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	71
4.2.4 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	72
4.2.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Kemakmuran Daerah dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian.....	77
5.2.1 Saran	77
5.2.2 Keterbatasan Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu	19
3.1 Operasional Variabel.....	37
3.2 Populasi Penelitian	38
4.1 Statistik Deskriptif	56
4.2 Hasil Uji <i>Chow</i>	58
4.3 Hasil Uji <i>Hausman</i>	58
4.4 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	59
4.5 Kesimpulan Hasil Uji Pemilihan Model	60
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	63
4.9 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	64
4.10 Hasil Koefisien Determinasi Adjusted (R ²).....	65
4.11 Hasil Uji F (Uji Simultan).....	66
4.12 Hasil Uji T (Uji Parsial)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan...	3
2.1 Kerangka Penelitian	27
4.1 Tren Ukuran Pemerintah per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun.....	48
4.2 Tren Ukuran Pemerintah per Tahun.....	49
4.3 Tren <i>Intergovernmental Revenue</i> per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun.	50
4.4 Tren <i>Intergovernmental Revenue</i> per Tahun.....	50
4.5 Tren Kemakmuran Daerah per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun.....	51
4.6 Tren Kemakmuran Daerah per Tahun.....	52
4.7 Tren <i>Leverage</i> per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun	53
4.8 Tren <i>Leverage</i> per Tahun	53
4.9 Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Kemandirian Selama 5 Tahun	54
4.10 Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Kemandirian per Tahun	55
4.11 Hasil Uji Normalitas.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing I
Lampiran 2	Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing II
Lampiran 3	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing I
Lampiran 4	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing II
Lampiran 5	Surat Izin Pengambilan Data
Lampiran 6	Hasil <i>Output</i> EViews
Lampiran 7	Tabel T dan F

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, paradigma pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan yang sangat mendasar. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi landasan utamanya dalam melaksanakan sistem desentralisasi agar tujuan otonomi daerah tercapai. Kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan otonomi desentralisasi yang sistematis kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan agar memberi hak, wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan serta pengelolaan wilayahnya masing-masing dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah kebebasan yang diberikan sebuah daerah untuk menciptakan peraturan asal daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan keuangan daerahnya sendiri.

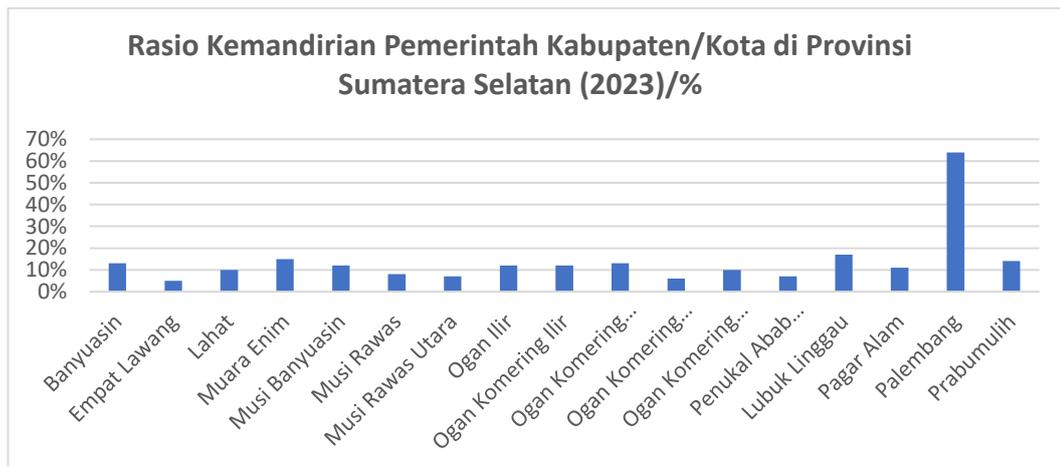
Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi pada prinsipnya merujuk kepada penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan upaya untuk memajukan masyarakat daerah sekaligus memajukan demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa desentralisasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, desentralisasi memberikan otonomi dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri sedangkan sentralisasi merupakan kekuasaan ditangan pemerintah pusat untuk menjaga keseragaman pemerintah.

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa pemerintah pusat merupakan institusi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara sedangkan pemerintah daerah merupakan institusi yang memiliki kebebasan dalam mengatur urusan pemerintahan lokal. Dalam menjalankan pemerintahan, pihak pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah selaku daerah yang mempunyai wewenang kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan wewenang suatu daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2018). Studi terdahulu juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai hasil dari pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Fernandes & Putri, 2022). Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui rasio keuangan pemerintah daerah. Rasio yang dapat digunakan salah satunya adalah rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio yang diterapkan pada APBD dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhinya. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh data yang disajikan di laporan keuangan dan dijelaskan oleh rasio keuangan (Siswanto & Maylani, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan anggaran, serta melaporkan hasilnya kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban akuntabel atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Permasalahan utama yang hingga saat ini masih sering terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan tingginya ketergantungan dengan Dana Transfer Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah dalam tingkat kemandirian daerah yang dapat dilihat pada gambar 1.1



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 1.1

Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan gambar 1.1 Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 masih belum menunjukkan kinerja keuangan yang optimal terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dfinubun & Gudono (2021) mengungkapkan bahwa suatu daerah dikatakan telah mandiri dan mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya apabila Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh telah mampu membiayai minimal 25% pengeluaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari masing-masing daerah yaitu Kabupaten Banyuwasin sebesar 13%, Kabupaten Empat Lawang sebesar 5%, Kabupaten Lahat sebesar 10%, Kabupaten Muara Enim sebesar 15%, Kabupaten Musi Banyuwasin sebesar 12%, Kabupaten Musi Rawas sebesar 8%, Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 7%, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 12%, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 12%, Kabupaten

Ogan Komering Ulu sebesar 13%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 6%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 10%, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 7%, Kota Lubuk Linggau sebesar 17%, Kota Pagar Alam sebesar 11%, Kota Palembang sebesar 64% dan Kota Prabumulih sebesar 14%.

Berdasarkan 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya Kota Palembang yang memiliki tingkat kemandirian paling tinggi yaitu hanya mencapai 64%. Sedangkan tingkat kemandirian paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Empat Lawang yaitu sebesar 5%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat kemandirian pada tahun 2023 masih belum merata dan tergolong sangat rendah. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat pada dua daerah tersebut, tetapi juga secara umum pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar daerah memiliki tingkat kemandirian fiskal di bawah 15%, yang mengindikasikan ketergantungan yang masih sangat tinggi pada transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum optimal, terutama dalam hal memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Fenomena dalam penelitian ini adalah ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat yang dapat menghambat kemampuan daerah dalam mengambil keputusan. Selain itu, perbedaan kemandirian fiskal antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan lebih lanjut. Oleh karena itu, ketimpangan ini dapat berdampak pada kualitas layanan publik di daerah dengan rasio kemandirian yang rendah.

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah Ukuran Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah adalah hal yang memberikan informasi terkait seberapa besar atau seberapa kecil pemerintah daerah tersebut. Total aset pemerintah daerah sebagai ukuran bisnis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah (Fauziah et al., 2023). Pemerintah daerah yang memiliki skala besar bisa berdampak positif pada operasional dan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dewanti (2022) menyatakan bahwa dalam penelitian yang mereka lakukan bahwa

ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati et al., 2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah *Intergovernmental Revenue*. *Intergovernmental Revenue* atau sering disebut Dana Perimbangan dengan jumlah yang tinggi diterima oleh pemerintah daerah akan menjadi sumber pembiayaan yang cukup bagi pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, jika dana perimbangan yang diterima kecil maka pemerintah daerah mempunyai kemungkinan untuk mengalami kekurangan dana untuk kegiatan operasionalnya sehingga kinerja yang dihasilkan tidak optimal. Mengenai variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa penganggaran dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Desky et al., 2023) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Ratnawati, 2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi suatu kebutuhan daerah. Kemakmuran daerah memiliki hubungan timbal balik dengan kinerja keuangan. Kemakmuran dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pendapatan yang stabil dan efisien, sementara kinerja keuangan yang baik mendukung pencapaian kemakmuran melalui pengelolaan anggaran yang efektif. Tingkat kemakmuran dapat diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan total Pendapatan. Apabila Pendapatan Asli Daerah tinggi maka hal tersebut mencerminkan bahwa suatu daerah semakin makmur. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Bernardin et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan cara paling maksimal dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga mempunyai tingkat

kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah (Mulyani et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan (Andani et al., 2019) menyatakan bahwa kemakmuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iswantini et al., 2021) mengungkapkan bahwa kemakmuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Leverage adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dimana semakin rendah *leverage*, semakin rendah pula ketergantungan terhadap entitas pada pihak luar. Sebaliknya, semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk (Prayuda & Arifin, 2024). Daerah dengan *leverage* tinggi, maka mereka cenderung memiliki kebergantungan ke pinjaman luar dalam mendanai aset. Hitungan rasio (Iswantini et al., 2021) *leverage* bagi pemerintah berperan vital bagi kreditur maupun calon kreditur selama menentukan keputusan dalam memberikan kredit. Rasio ini hendak dipergunakan kreditur untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utang mereka (Manafe et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah et al., 2023), memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati, 2024) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan dengan baik berdasarkan Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih tergolong sangat rendah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Ardhana et al., 2024) dengan mengurangi variabel Pendapatan Asli Daerah.

Alasan penulis menghapus variabel tersebut dikarenakan banyak penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif yang sudah terbukti terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, variabel tersebut sudah tervalidasi. Selain itu, penulis juga menambahkan variabel baru yaitu *Intergovernmental Revenue* dan *Leverage*. Penambahan ini dilakukan karena penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi antara hasil yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap variabel *Intergovernmental Revenue* dalam penelitian (Desky et al., 2023; Putri & Ratnawati, 2023) dan variabel *Leverage* dalam penelitian (Fauziah et al., 2023; Kusumawati, 2024). Hal ini yang menjadi faktor penarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut variabel tersebut.

Dengan merujuk pada berbagai faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, peneliti tertarik mengangkat tema ini dalam sebuah penelitian. Sehingga, penelitian ini dapat menggambarkan kemampuan keuangan setiap daerah masing-masing secara independen dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri untuk dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah nya dengan baik tanpa bergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada pembahasan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah Kemakmuran Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup permasalahan agar penelitian terfokus dan tidak meluas. Penulis membatasi pembahasan hanya pada variabel independen yang terdiri dari Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* sedangkan variabel dependen dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Intergovernmental Revenue* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kemakmuran Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang didapat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi bagi penulis mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat mengetahui faktor yang bisa terjadi disebabkan oleh kinerja keuangan daerah.
- b. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang didapat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai acuan dan pedoman untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan pembangunan nasional dan pelayanan kepada publik.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang bisa dijadikan untuk bahan referensi dan evaluasi untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Studi terdahulu juga mengungkapkan bahwa teori keagenan merupakan teori ekonomi yang berbicara tentang hubungan antara prinsipal dan agen, prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah, dan agen adalah pihak yang menerima perintah dari prinsipal (Prayuda & Arifin, 2024). Pemerintah daerah yang telah memperoleh wewenang langsung dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Pemerintah seharusnya tidak boleh menunjukkan perilaku yang menyimpang dari peraturan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Masyarakat sering merasa kecewa atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah lebih mengutamakan kesejahteraan dirinya sendiri dan melupakan kepentingan masyarakat umum. Sehingga laporan kinerja dari pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Untuk dapat mencegah konflik kepentingan ini, diperlukannya regulasi yang dapat menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Zelmianti (2016) mengatakan bahwa didalam teori keagenan juga membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer yang mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, manajer mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar. Jika manajer tersebut gagal dalam menjalankan amanah tersebut maka jabatan dan segala fasilitasnya menjadi taruhan. Alasan itulah yang membuat manajer semata-mata ingin melindungi dirinya sendiri dan merugikan banyak pihak.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen yang mengelola pemerintahan, bertanggung

jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selaku prinsipal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang detail serta bersifat transparan kepada masyarakat agar mereka dapat menilai kinerja yang dimiliki pemerintah serta mengevaluasi tugas-tugas yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka pemerintah dapat mengerahkan semua kemampuan untuk dapat menghasilkan kinerja yang akuntabel.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kinerja merupakan bentuk dari hasil keluaran atas suatu program yang telah direncanakan yang berkaitan dengan penggunaan suatu anggaran berdasarkan kuantitas dan kualitas yang telah terukur. Definisi kinerja keuangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah segala bentuk hak maupun kewajiban suatu daerah yang berwujud uang atau barang yang dapat memiliki hak milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan atas hak maupun kewajiban tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah aspek penting bagi masyarakat mengenai akuntabilitas organisasi dan manajemen untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang baik. Kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri masih berada dalam pengelolaan pemerintah pusat. Hubungan yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah adanya hubungan sektor keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Wulandari, 2021). Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya didasarkan atas ketekunan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 merupakan segala hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang memiliki hak milik daerah menurut hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kinerja keuangan daerah secara akuntabilitas dapat dilakukan pengukuran menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian dan rasio aktivitas. Rasio keuangan berfungsi sebagai indikator dan

analisis kinerja keuangan atas suatu pemerintah daerah, dalam penelitian ini akan menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut (Mahmudi, 2019) berikut fungsi analisis rasio keuangan adalah :

- a. Menganalisis tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah dalam menggunakan anggaran untuk menyelenggarakan kebutuhan daerah.
- b. Menilai kontribusi atas sumber pendapatan dalam menghasilkan suatu pendapatan daerah.
- c. Mengkaji suatu program pemerintah daerah dalam merealisasikan dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah.
- d. Menilai tingkat efisiensi dan efektivitas untuk merealisasikan pendapatan suatu daerah.
- e. Meninjau pertumbuhan atas penerimaan maupun pengeluaran dalam periode waktu tertentu.

Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian, rasio kemandirian memberikan gambaran seberapa besar tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Rasio kemandirian juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Faud (2016) kemandirian keuangan daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan indikator rasio kemandirian keuangan APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Rasio kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini mempunyai hubungan dengan Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* serta rasio kemandirian menjadi faktor untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama untuk menilai kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tergolong dalam kategori sangat rendah yaitu dibawah 25%.

Kriteria tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Kinerja Keuangan	Persentase Kemandirian
Sangat Rendah	25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber : Kemendagri dalam (Difinubun & Gudono, 2021)

2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Size (Ukuran) merupakan suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat mengukur total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah juga dapat diproksikan sebagai total aset yang dimiliki daerah serta memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Wardani et al., 2022). Pemerintah daerah yang memiliki skala besar bisa berdampak positif pada operasional dan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan total aset selama periode tertentu, yang dapat dilihat pada neraca didalam laporan keuangan. Total aset yang berada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencakup aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, piutang pajak, piutang dana bagi hasil, piutang retribusi, aset tetap, deposito dan dana cadangan.

Dalam penelitian ini, variabel ukuran pemerintah daerah diperkirakan berdasarkan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki aset yang kuat agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sumber daya dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang mempunyai ukuran yang besar akan dituntut mempunyai kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang mempunyai ukuran kecil (Ardiami & Rhomandhonna, 2023). Pengukuran variabel ukuran pemerintah daerah dilakukan dengan total aset selama periode tertentu, yang dapat dilihat pada neraca didalam laporan keuangan (Sari et al., 2016).

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Log Total Aset Daerah}$$

2.1.4 *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Novianti (2022) mengatakan bahwa *intergovernmental revenue* atau dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dengan melihat kenyataannya bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Semakin banyaknya *intergovernmental revenue* berarti semakin banyak dana yang diperoleh untuk membiayai tupoksi pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Semakin baik kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja yang bagus pula. Karena dana tersebut banyak maka, menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut bisa mengoptimalkan dana tersebut. Namun, semakin banyaknya dana alokasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut masih memiliki

ketergantungan dana dari pusat daripada mengoptimalkan potensi kekayaan daerah tersebut, maka masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah daerah buruk karena membiarkan daerahnya tidak bisa mengoptimalkan potensi kekayaan daerah. Sumber-sumber *intergovernmental revenue* terdiri dari dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil juga merupakan sumber pendapatan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan guna memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Dana bagi hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam artian penerimaan dana bagi hasil setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan negara.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai semua kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan suatu daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan dari keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan serta potensi daerah (Zikral et al., 2024).

Dana alokasi umum yang menjadi penyangga utama dalam pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD.

Dengan adanya transfer melalui dana ini bagi pemerintah daerah menjadi salah satu sumber dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat bersumber dari pendanaannya sendiri yaitu PAD.

Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang disalurkan untuk gaji pegawai. Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Perimbangan Otonomi Daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

DAK berperan penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK ini diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal karena DAK cenderung dapat menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan mengalokasikan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, maka

daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya. Menurut Asmaul (2016) pengukuran variabel *intergovernmental revenue* dapat dilakukan dengan rumus :

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \text{Log Total Dana Perimbangan}$$

2.1.5 Kemakmuran Daerah

Kemakmuran (*Wealth*) merupakan suatu kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan suatu daerah dengan memanfaatkan pendapatan yang didapatkan oleh daerah (Aristy & Achyani, 2019). Kemakmuran daerah memiliki hubungan timbal balik dengan kinerja keuangan. Kemakmuran dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pendapatan yang stabil dan efisien, sementara kinerja keuangan yang baik mendukung pencapaian kemakmuran melalui pengelolaan anggaran yang efektif. PAD yang besar dapat menunjukkan jika suatu daerah mampu menggunakan sumber daya alam dan potensi yang ada. Tingkat kemakmuran suatu daerah juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada sebagai peningkatan kinerja pemerintah. Semakin tinggi PAD maka semakin bagus pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah akan semakin mudah memenuhi kebutuhan daerahnya serta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dengan meningkatnya pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan daerahnya, hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah terus berjalan secara efisien. Dengan memberikan pelayanan maksimal juga akan mempermudah masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik, sementara penyempurnaan dari kehidupan masyarakat atau secara tidak langsung juga memberi bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan suatu kegiatan yang sudah memberikan suatu prestasi (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kinerja pemerintah sudah layak diperhitungkan dengan pembuktiannya dalam ekonomi yaitu kemakmuran dan segala manfaat dari kemakmuran yang sudah dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa kemakmuran dapat berpengaruh terhadap kinerja dan semakin tinggi kemakmuran semakin tinggi kinerja atau sebaliknya. Menurut Aulia

& Rahmawaty (2020) pengukuran variabel kemakmuran daerah dapat dilakukan dengan rumus :

$$\text{Kemakmuran Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2.1.6 *Leverage*

Leverage adalah proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal daerah sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang yang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut akan menggambarkan jika sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal. *Leverage* merupakan perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas dari pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan suatu entitas (Sari et al., 2016).

Leverage berkaitan dengan penggunaan aktiva atau dana, dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap. *Leverage* juga memberikan gambaran struktur modal suatu perusahaan sehingga terlihat tingkat risiko tidak tertagihnya utang. Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka akan memiliki kinerja buruk karena sumber pendanaan terbesarnya berasal dari pihak eksternal. Semakin tinggi *leverage* semakin ketat kontrol kreditur kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, agar kreditur yakin bahwa pemerintah daerah mampu membayar dan menyelesaikan utang.

Kreditur akan menggunakan rasio ini untuk menilai kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini mengukur bagian setiap rupiah ekuitas dana yang digunakan sebagai jaminan untuk seluruh utang. Rasio ini juga dapat mengidentifikasi seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus mencari jalan untuk mengurangi utang.

Leverage adalah kemampuan keuangan pemerintah dalam melunasi hutang pendek dan biaya proyeknya. *Leverage* adalah perbandingan utang dan modal, yaitu perbandingan hutang sejumlah uang bagi suatu entitas dengan ekuitas

harga. *Leverage* merupakan jumlah proporsi dari total hutang terhadap ekuitas. Semakin rendah *leverage*, maka semakin rendah pula ketergantungan entitas pada pihak luar. Hal ini karena kepemilikan pemerintah daerah menjalankan keuangan dan alokasinya. Hitungan rasio *leverage* bagi pemerintah berperan penting bagi kreditur maupun calon kreditur selama menentukan keputusan dalam memberikan kredit. Rasio ini hendak dipergunakan kreditur untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayar utang mereka. Hasil yang diperoleh akan kreditur gunakan dalam menentukan kapabilitas pemerintah daerah selama membayarkan utang mereka. Rasio ini memberi indikasi besar kecilnya utang yang membebani pemerintah daerah. Semakin tinggi *leverage*, maka kinerja keuangan daerah semakin buruk. Dengan begitu, daerah itu belum bisa mendanai operasional mereka sehingga masih memerlukan pinjaman dari pihak lain (Manafe et al., 2023). Pengukuran variabel *leverage* dapat menggunakan total utang dan total ekuitas dana (Sari et al., 2016) dengan rumus :

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas Dana}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat mengembangkan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah, *Leverage* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Zahrah et al., 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 PAD X2 Opini Audit X3 Belanja Modal Y Kinerja Keuangan	1.PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2.Opini audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Pemerintah Daerah	pemerintah daerah, dan 3. Belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2	(Prayuda & Arifin, 2024)	Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	X1 Ukuran Pemerintah Daerah X2 Ukuran Legislatif X3 Tingkat Ketergantungan Daerah X4 <i>Leverage</i> X5 PAD Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Ukuran legislatif tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 3. Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 4. <i>Leverage</i> berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 5. PAD tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3	(Saraswati et al., 2024)	Analisis Kinerja Keuangan: Bukti Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2020-2022	X1 Ukuran Pemerintah Daerah X2 PAD X3 Belanja Modal Y	1. Ukuran pemerintah daerah tidak memberi dampak pada kinerja keuangan pemda. 2. Pendapatan asli daerah memberi dampak pada kinerja

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Kinerja Keuangan	keuangan pemda secara positif. 3. Belanja modal memberi dampak pada kinerja keuangan pemda secara negative.
4	(Chilly Bella Tiara Sedek & Kusumawati, 2024)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 <i>Leverage</i> X2 Tingkat Kekayaan X3 Tingkat Ketergantungan X4 Temuan Audit X5 Pendapatan Pajak Daerah Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya proporsi tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan padapusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya proporsi tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>4. Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
5	(Ardhana et al., 2024)	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>X1 PAD</p> <p>X2 Ukuran Pemerintah Daerah</p> <p>X3 Dana Perimbangan</p> <p>X4 Opini Audit</p> <p>X5 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah</p> <p>Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>2. Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>3. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>4. Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.</p>

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				5. Tingkat Pendidikan Kepala Daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6	(Sunandar, 2023)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017-2021	X1 Pertumbuhan Ekonomi X2 Ukuran Pemerintah Daerah X3 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah X4 Umur Pemerintah Daerah Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Tingkat Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
7	(Amin Insani et al., 2023)	Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 PAD X2 Dana Perimbangan X3 Belanja Modal X4	1. Pendapatan asli daerah dan memberikan pengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Dana perimbangan memberikan

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Pertumbuhan Ekonomi X5 Opini Audit Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	pengaruh yang negatif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. 3.Belanja modal memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4.Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5.Opini audit memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8	(Manafe et al., 2023)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)	X1 Ukuran Pemerintah X2 <i>Leverage</i> X3 Dana Perimbangan Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1.Ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. <i>Leverage</i> berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah 3.Dana perimbangan berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah 4.Ukuran pemerintah daerah, <i>leverage</i> , dan dana perimbangan positif maupun krusial pada kinerja

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				keuangan pemerintah daerah.
9	(Dewanti, 2022)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia	X1 Ukuran Pemerintah Daerah X2 Ukuran Legislatif X3 Opini Audit Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1.Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2.Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3.Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
10	(Aristy & Achyani, 2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	X1 Ukuran Pemerintah Daerah X2 Kemakmuran Daerah X3 <i>Intergovernmental Revenue</i> X4 Belanja Modal X5 Temuan Audit X6 Opini Audit Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1.Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2.Kemakmuran suatu daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. <i>Intergovernmental Revenue</i> pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 6. Opini audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber : Data diolah, 2025

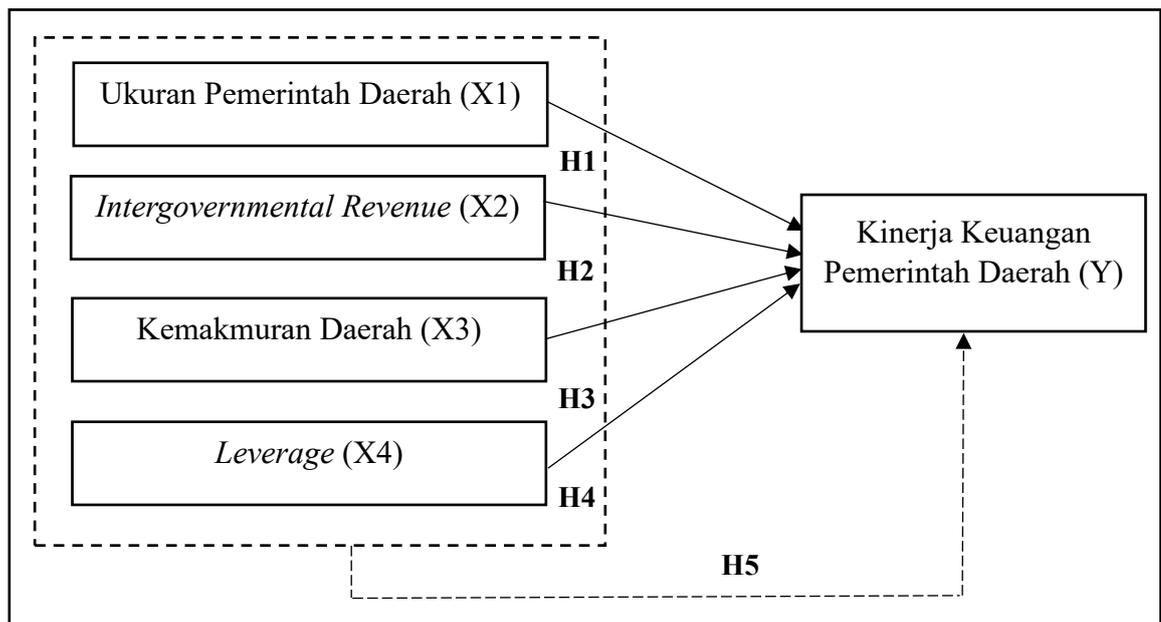
Penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan batasan penelitian, serta variabel dan tahun anggaran yang berbeda.

2.3 Kerangka Penelitian

Sugiyono (2022) mengungkapkan bahwa kerangka berpikir adalah hubungan antar variabel yang telah disusun dari beberapa teori yang kemudian di deskripsikan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Syahputri et al., 2023).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan menguji variabel Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian yang peneliti ambil dari sumber yang ada dan permasalahan yang ada, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian yang ada sesuai dengan variabel Independen dan variabel Dependen sebagaimana tersaji pada gambar 2.1 berikut :



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Keterangan :

—————> : Pengaruh variabel Parsial

----- : Pengaruh variabel Simultan

Berdasarkan gambar kerangka penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel Independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (X1), *Intergovernmental Revenue* (X2), Kemakmuran Daerah (X3), dan *Leverage* (X4) diduga berpengaruh terhadap variabel Dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara parsial dan simultan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2022) mengungkapkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yaitu menguji apakah Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah adalah hal yang memberikan informasi terkait seberapa besar atau seberapa kecil pemerintah daerah tersebut. Total aset pemerintah daerah sebagai ukuran bisnis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah (Fauziah et al., 2023). Ukuran pemerintah daerah juga dapat diproksikan sebagai total aset dalam suatu daerah serta memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Wardani et al., 2022). Pemerintah daerah yang memiliki skala besar bisa berdampak positif pada operasional dan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewanti, 2022) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati et al., 2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Diduga ada pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Novianti (2022) mengatakan bahwa *intergovernmental revenue* atau dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dengan melihat kenyataannya bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Semakin banyaknya *intergovernmental revenue* berarti semakin banyak dana yang diperoleh untuk membiayai tupoksi pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Semakin baik kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja yang bagus pula. Karena dana tersebut banyak maka, menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut bisa mengoptimalkan dana tersebut. Namun, semakin banyaknya dana alokasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut masih memiliki ketergantungan dana dari pusat daripada mengoptimalkan potensi kekayaan daerah tersebut, maka masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah daerah buruk karena membiarkan daerahnya tidak bisa mengoptimalkan potensi kekayaan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Desky et al., 2023) mengungkapkan bahwa *intergovernmental revenue* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Ratnawati, 2023) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Diduga ada pengaruh *Intergovernmental Revenue* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Pengaruh Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Kemakmuran (*Wealth*) merupakan suatu kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan suatu daerah dengan memanfaatkan pendapatan yang didapatkan oleh daerah (Aristy & Achyani, 2019). Kemakmuran daerah memiliki hubungan timbal balik dengan kinerja keuangan. Kemakmuran dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pendapatan yang stabil dan efisien, sementara kinerja keuangan yang baik mendukung pencapaian kemakmuran melalui pengelolaan anggaran yang efektif. PAD yang besar dapat menunjukkan jika suatu daerah mampu menggunakan sumber daya alam dan potensi yang ada. Tingkat kemakmuran suatu daerah juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan

publik yang ada sebagai peningkatan kinerja pemerintah. Semakin tinggi PAD maka semakin bagus pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iswantini et al., 2021) mengungkapkan bahwa kemakmuran daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian (Andani et al., 2019) menyatakan bahwa kemakmuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Diduga ada pengaruh Kemakmuran Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage merupakan perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas dari pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan suatu entitas (Sari et al., 2016). Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka akan memiliki kinerja buruk karena sumber pendanaan terbesarnya berasal dari pihak eksternal. Semakin tinggi *leverage* semakin ketat kontrol kreditur kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, agar kreditur yakin bahwa pemerintah daerah mampu membayar dan menyelesaikan utang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah et al., 2023) mengungkapkan bahwa *leverage* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati, 2024) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Diduga ada pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5 : Diduga ada pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan yaitu LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk Periode 2019-2023 yang bersumber dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2025.

3.3 Variabel Penelitian

Sugiyono (2022) mengungkapkan bahwa variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini memiliki empat variabel Independen (X) yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* serta satu variabel Dependen (Y) yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3.3.1 Variabel Dependen

Sugiyono (2022) menyatakan bahwa variabel dependen atau sering disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen atau variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.3.2 Variabel Independen

Sugiyono (2022) menyatakan bahwa variabel independen atau yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent* dan dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Ukuran Pemerintah Daerah (X1), *Intergovernmental Revenue* (X2), Kemakmuran Daerah (X3) dan *Leverage* (X4).

3.3.3 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan suatu proses mendefinisikan variabel penelitian secara spesifik agar dapat diukur dengan jelas dan digunakan dalam analisis statistik. Operasional variabel diperlukan guna untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasional variabel juga bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen, kemudian ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, kemakmuran daerah dan *leverage* sebagai variabel independen. Berikut penjelasan mengenai definisi operasional variabel :

1. Ukuran Pemerintah Daerah (X1)

Size (Ukuran) merupakan suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat mengukur total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah juga dapat diprosikan sebagai total aset yang dimiliki daerah serta memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Wardani et al., 2022). Pemerintah daerah yang memiliki skala besar bisa berdampak positif pada operasional dan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh (Dewanti, 2022) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati et al., 2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran variabel ukuran pemerintah daerah dilakukan dengan total aset selama periode tertentu, yang dapat dilihat pada neraca didalam laporan keuangan (Sari et al., 2016).

Ukuran Pemerintah Daerah = Log Total Aset Daerah
--

2. *Intergovernmental Revenue* (X2)

Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Novianti (Novianti, 2022) mengatakan bahwa *intergovernmental revenue* atau dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dengan melihat kenyataannya bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi. Semakin banyaknya *intergovernmental revenue* berarti semakin banyak dana yang diperoleh untuk membiayai tupoksi pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Semakin baik kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja yang bagus pula. Karena dana tersebut banyak maka, menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut bisa mengoptimalkan dana tersebut. Namun, semakin banyaknya dana alokasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut masih memiliki ketergantungan dana dari pusat daripada mengoptimalkan potensi kekayaan daerah tersebut, maka masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah daerah buruk karena membiarkan daerahnya tidak bisa mengoptimalkan potensi kekayaan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Desky et al., 2023) mengungkapkan bahwa *intergovernmental revenue* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Ratnawati, 2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Menurut Asmaul (2016) pengukuran variabel *intergovernmental revenue* dapat dilakukan dengan rumus :

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \text{Log Total Dana Perimbangan}$$

3. Kemakmuran Daerah (X3)

Kemakmuran (*Wealth*) merupakan suatu kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan suatu daerah dengan memanfaatkan pendapatan yang didapatkan oleh daerah (Aristy & Achyani, 2019). Kemakmuran daerah memiliki hubungan timbal balik dengan kinerja keuangan. Kemakmuran dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pendapatan yang stabil dan efisien, sementara kinerja keuangan yang baik mendukung pencapaian kemakmuran melalui pengelolaan anggaran yang efektif. PAD yang besar dapat menunjukkan jika suatu daerah mampu menggunakan sumber daya alam dan potensi yang ada. Tingkat kemakmuran suatu daerah juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada sebagai peningkatan kinerja pemerintah. Semakin tinggi PAD maka semakin bagus pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iswantini et al., 2021) mengungkapkan bahwa kemakmuran daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian (Andani et al., 2019) menyatakan bahwa kemakmuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Aulia & Rahmawaty (2020) pengukuran variabel kemakmuran daerah dapat dilakukan dengan rumus :

$$\text{Kemakmuran Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

4. Leverage (X4)

Leverage adalah proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal daerah sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang yang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut akan menggambarkan jika sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal. *Leverage* merupakan perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas dari pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan suatu entitas (Sari et al., 2016). Pemerintah

daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka akan memiliki kinerja buruk karena sumber pendanaan terbesarnya berasal dari pihak eksternal. Semakin tinggi *leverage* semakin ketat kontrol kreditur kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, agar kreditur yakin bahwa pemerintah daerah mampu membayar dan menyelesaikan utang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah et al., 2023) mengungkapkan bahwa *leverage* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati, 2024) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran variabel *leverage* dapat menggunakan total utang dan total ekuitas dana (Sari et al., 2016) dengan rumus :

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas Dana}}$$

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja merupakan bentuk dari hasil keluaran atas suatu program yang telah direncanakan yang berkaitan dengan penggunaan suatu anggaran berdasarkan kuantitas dan kualitas yang telah terukur. Definisi kinerja keuangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah segala bentuk hak maupun kewajiban suatu daerah yang berwujud uang atau barang yang dapat memiliki hak milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan atas hak maupun kewajiban tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah aspek penting bagi masyarakat mengenai akuntabilitas organisasi dan manajemen untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang baik. Menurut (Mahmudi, 2019) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber Data
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$ (Mahmudi, 2019)	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	$\text{Log Total Aset Daerah}$ (Sari et al., 2016)	Rasio	Neraca
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X2)	$\text{Log Total Dana Perimbangan}$ (Asmaul, 2016)	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran
Kemakmuran Daerah (X3)	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$ (Aulia & Rahmawaty, 2020)	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran
<i>Leverage</i> (X4)	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas Dana}}$ (Sari et al., 2016)	Rasio	Neraca

Sumber : Data diolah, 2025

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Berikut daftar populasi yang digunakan:

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banyuasin
2	Kabupaten Empat Lawang
3	Kabupaten Lahat
4	Kabupaten Muara Enim
5	Kabupaten Musi Banyuasin
6	Kabupaten Musi Rawas
7	Kabupaten Musi Rawas Utara
8	Kabupaten Ogan Ilir
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
14	Kota Lubuklinggau
15	Kota Pagar Alam
16	Kota Palembang
17	Kota Prabumulih

Sumber : BPK RI, 2025

3.4.2 Sampel

Sugiyono (2022) mengungkapkan bahwa sampel adalah bagian yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode sampel jenuh. Sampel jenuh adalah sampel yang jika ditambah jumlahnya, tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jumlah pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota dengan tahun anggaran 2019-2023 (5 tahun). Dengan demikian, jumlah sampel yang akan diteliti adalah 85 data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022) teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua sumber data yaitu sumber primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Peneliti memanfaatkan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen sumber yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Metode ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data mengenai laporan realisasi anggaran, neraca dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penelitian. Data yang telah terkumpul akan dianalisis guna mengevaluasi kinerja keuangan yang relevan.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022) teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan *Software Econometric Views 12 (EViews 12)* tahun 2024.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022) analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang terkumpul kemudian ditabulasikan dan didiskusikan secara deskriptif. Dalam hal ini, para peneliti dalam mendeskripsikan jawaban atau tanggapan responden terhadap semua konsep yang diukur.

3.6.2 Analisis Pemilihan Model

Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis data yang dapat dianalisis secara statistik, yaitu data silang (*cross section*), data runtut waktu (*time series*) dan data panel (*pooled data*). Data panel merupakan data gabungan antara data runtut waktu dan data silang. Data panel dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan data dimana perilaku unit data silang diamati sepanjang waktu.

Beberapa keunggulan jenis data panel dibandingkan data silang dan data runtut waktu, yaitu :

- a. Data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, tingkat kolinearitas antar variabel lebih rendah dan lebih efisien.
- b. Data panel tepat digunakan dalam penelitian perubahan yang dinamis.
- c. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data runtut waktu atau data silang saja.

Untuk mengestimasi model pengujian terbaik, maka dilakukan analisis untuk menentukan model yang digunakan. Terdapat tiga model yang dapat dipilih yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM), yaitu sebagai berikut :

1. *Common Effect Model* (CEM)

Menurut Ghozali (2017) model *Common Effect* atau koefisien tetap antar waktu dan individu merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data runtut waktu dan data silang tanpa melihat perbedaan individu.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Menurut Ghozali (2017) model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model ini menggunakan cara teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan.

3. *Random Effect Model* (REM)

Menurut Ghozali (2017) model *Random Effect* atau biasa disebut *Error Component Model* (ECM) yaitu model yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan akan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu.

3.6.2.1 Uji Pemilihan Model

Ghozali (2017) menyatakan bahwa pemilihan model untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi dapat digunakan tiga pengujian yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier* sebagai berikut :

1. Uji *Chow*

Ghozali (2017) mengemukakan bahwa uji *Chow* berguna untuk menentukan uji mana diantara kedua model yakni *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji *chow* sebagai berikut :

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Apabila hasil uji menunjukkan probabilitas F lebih dari taraf signifikansi 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*. Sebaliknya, jika probabilitas F kurang dari signifikansi 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji *Hausman*

Ghozali (2017) mengemukakan bahwa uji *Hausman* berguna untuk menentukan uji mana diantara kedua *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model* yang sebaiknya dilakukan dalam permodelan data panel. Hipotesis dalam uji *hausman* sebagai berikut :

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Apabila probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka H0 ditolak dan model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* begitupun sebaliknya.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Ghozali (2017) mengemukakan bahwa *Lagrange Multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* metode *Ordinal Least Square* (OLS) yang paling tepat digunakan. Jika nilai LM statistic lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka kita menolak hipotesis nol, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah *Random Effect Model* daripada *Common Effect Model*. Sebaliknya, jika LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah *Common Effect*

Model bukan *Random Effect Model*. Uji LM digunakan manakala pada uji *Chow* menunjukkan model yang dipakai adalah *Common Effect Model*, sedangkan pada uji *Hausman* menunjukkan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* yang tepat.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat yang menjadi dasar penggunaan model regresi berganda adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian bersifat tidak biasa dan efisien. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Ghozali (2017) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera (JB) dengan histogram-normality test. Dengan Tingkat signifikansi 5%, indikator yang digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak yaitu :

- a. Apabila nilai probabilitas lebih besar ($>$) dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.
- b. Apabila nilai probabilitas lebih kecil ($<$) dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan hubungan linear antara variabel bebas. Sugiyanto (2022) mengungkapkan bahwa uji multikolinearitas bertujuan guna menguji apakah model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel. Bila terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya, maka

hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Sugiyanto (2022) mengungkapkan bahwa tingkat signifikansi 10,00, adanya multikolinearitas antar variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan matriks korelasi dengan ketentuan yaitu :

- a. Jika nilai *VIF* lebih besar dari ($>$) 10,00 maka terdapat multikolinearitas.
- b. Jika nilai *VIF* lebih kecil dari ($<$) dari 10,00 maka tidak terdapat multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan guna menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain konstan maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang dianggap baik adalah residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang konstan atau homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa untuk menilai heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen lain. Dengan tingkat signifikansi 5% adanya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan kriteria berikut :

- a. Jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar ($>$) dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas variabel independen lebih kecil ($<$) dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa uji autokorelasi bertujuan guna menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu dengan lainnya. Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW), dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu :

a. Metode *Durbin Watson*

Kriteria pengambilan Keputusan :

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (dUU) dan (4-dU) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dL) maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila DW lebih besar dari (4-dU) maka koefisien autokorelasi nya lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi.
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (dU) dan bawah (dL) atau DW terletak antara (4dU) dan (4-dL) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

b. Metode *Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test*

Ketentuan yang digunakan yaitu jika nilai *Prob.chi squared* (2) pada $Obs * R-Squared > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi.

3.6.4 Analisis Model Terpilih

Analisis model terpilih digunakan untuk penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel independen. Ghazali (2017) mengungkapkan analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + \beta_4(X_4) + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α	: Nilai Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$: Koefisien Regresi
X1	: Ukuran Pemerintah Daerah
X2	: <i>Intergovernmental Revenue</i>
X3	: Kemakmuran Daerah
X4	: <i>Leverage</i>
e	: <i>error</i>

Sebagai dasar suatu analisis, nilai koefisien regresi sangat menentukan hasil penelitian. Jika koefisien β bernilai positif (+) maka dapat disimpulkan terjadinya pengaruh searah antara variabel bebas dengan variabel terikat, setiap kenaikan nilai variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel terikat. Sebaliknya, jika koefisien β bernilai negatif (-) maka dapat disimpulkan terjadinya pengaruh berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat, setiap kenaikan nilai variabel bebas akan mengakibatkan penurunan variabel terikat.

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas Ukuran Pemerintah Daerah (X1), *Intergovernmental Revenue* (X2), Kemakmuran Daerah (X3), *Leverage* (X4) dengan variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa koefisien determinasi berguna dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Banyak peneliti sebelumnya menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun bila satu variabel independen ditambahkan dalam model regresi. Jika dalam uji empiris terdapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol.

3.6.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t) dengan estimasi untuk regresi linier data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) yang disajikan dalam tabel berikut :

3.6.6.1 Uji F (Uji Simultan)

Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Langkah-langkah pengujiannya yaitu :

1. Menentukan hipotesis
 - $H_0=0$: Semua variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
 - $H_a \neq 0$: Semua variabel independent (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
2. Menentukan signifikansi
 - Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ ($sign \leq \alpha$), artinya signifikan.
 - Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ ($sign \geq \alpha$), artinya tidak signifikan.
3. Membuat kesimpulan
 - Jika $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - Jika $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen

3.6.6.2 Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas Ukuran Pemerintah Daerah (X1), *Intergovernmental Revenue* (X2), Kemakmuran Daerah (X3) dan *Leverage* (X4) dengan variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Ghozali (2017) mengungkapkan bahwa uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel

dependen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan. Pengujian ini juga didasari oleh tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkah pengujiannya yaitu :

1. Menentukan hipotesis
 - $H_0=0$: Semua variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
 - $H_a \neq 0$: Semua variabel independent (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
2. Menentukan signifikansi
 - Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ ($\text{sign} \leq \alpha$), artinya signifikan.
 - Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ ($\text{sign} \geq \alpha$), artinya tidak signifikan.
3. Membuat kesimpulan
 - Jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - Jika $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Untuk memahami arah perkembangan variabel secara lebih komprehensif, dilakukan analisis tren terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis ini menyajikan nilai rata-rata tahunan dari masing-masing variabel pada setiap kabupaten/kota selama lima tahun berturut-turut, serta rata-rata keseluruhan antar pemerintah kabupaten/kota dalam setiap tahun. Dalam hal ini, tren tidak hanya menggambarkan dinamika antar waktu, tetapi juga mengungkap perbedaan antar unit dalam hal pengelolaan fiskal dan tingkat kemandirian keuangan. Pola-pola yang muncul dari data tren tersebut dapat menjadi indikator awal atas potensi pengaruh antar variabel yang akan dianalisis lebih lanjut melalui uji regresi. Tren dari masing-masing variabel akan digambarkan pada gambar di bawah ini :



Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.1
Tren Ukuran Pemerintah Daerah per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun

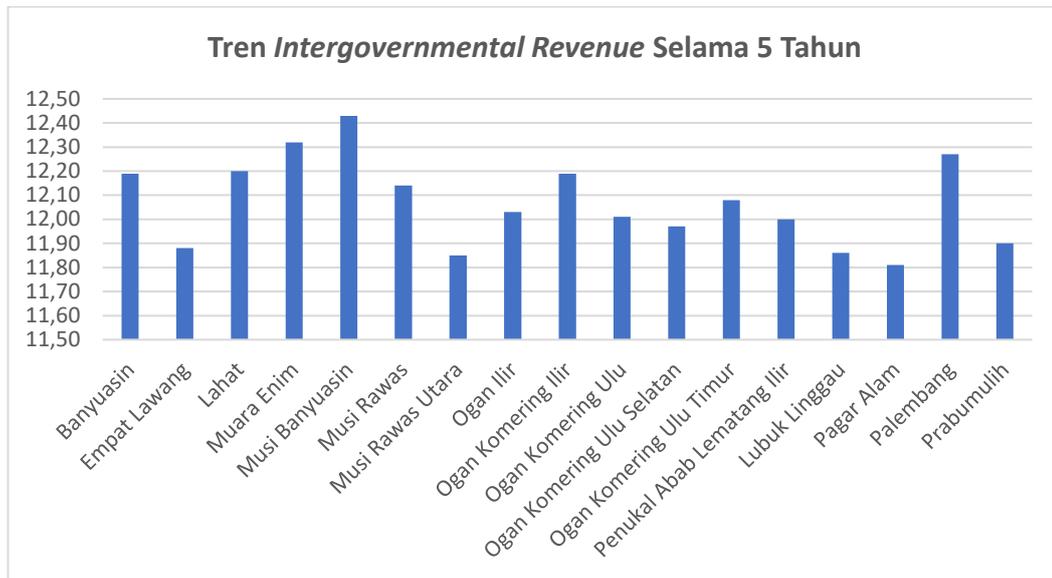


Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.2
Tren Ukuran Pemerintah Daerah per Tahun

Berdasarkan hasil penjelasan pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata total aset daerah selama periode 2019 hingga 2023, terdapat perbedaan yang cukup drastis antar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan total aset daerah yang cukup tinggi, seperti Kota Palembang dengan rata-rata tertinggi sebesar (13,24), kemudian disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan rata-rata sebesar (12,91) dan Kabupaten Muara Enim dengan rata-rata sebesar (12,85). Sebaliknya, kabupaten/kota seperti Kabupaten Empat Lawang (12,39), Kota Pagar Alam (12,38) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (12,36) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi total aset daerah selama lima tahun tersebut.

Pada gambar 4.2 total aset daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat. Tahun 2019 mencatat sebesar 12,55, lalu meningkat sebesar 12,56 pada tahun 2020. Peningkatan tetap berlanjut pada tahun 2021 sebesar 12,58, lalu meningkat sebesar 12,61 pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12,64. Tren yang terus meningkat menunjukkan bahwa total aset daerah juga mengalami peningkatan selama lima tahun tersebut.



Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.3
Tren Intergovernmental Revenue per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun



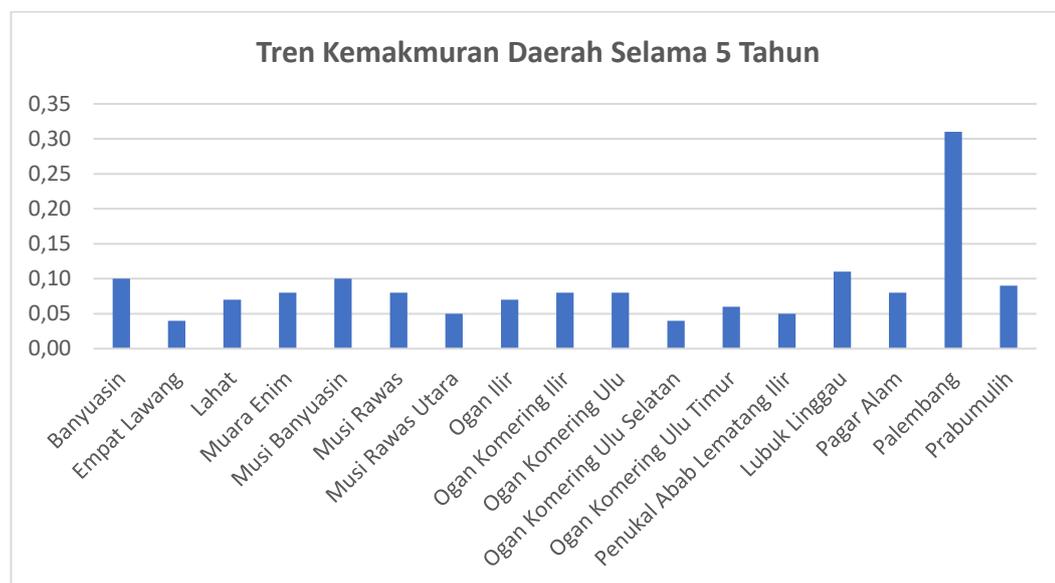
Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.4
Tren Intergovernmental Revenue per Tahun

Berdasarkan hasil penjelasan pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata total dana perimbangan selama periode 2019 hingga 2023, terdapat beberapa kabupaten/kota menunjukkan total dana perimbangan yang cukup tinggi, seperti

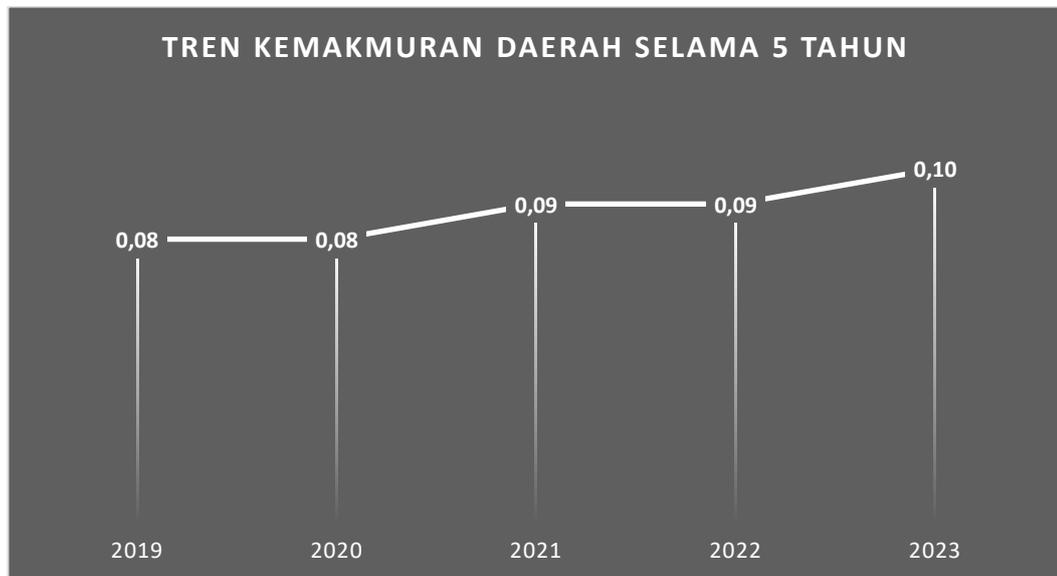
Kabupaten Musi Banyuasin dengan rata-rata tertinggi sebesar (12,43), kemudian disusul oleh Kabupaten Muara Enim sebesar (12,32) dan Kota Palembang sebesar (12,27). Sebaliknya, kabupaten/kota seperti Kota Lubuk Linggau (11,86), Kabupaten Musi Rawas Utara (11,85) dan Kota Pagar Alam (11,81) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi total dana perimbangan selama lima tahun tersebut.

Pada gambar 4.4 total dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi ringan namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019, proporsi total dana perimbangan berada di angka 12,08, lalu menurun menjadi 12,03 pada tahun 2020, kemudian meningkat sebesar 12,04 pada tahun 2021. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 sebesar 12,08 dan meningkat sebesar 12,11 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana perimbangan relatif konsisten dan bahkan meningkat di tahun-tahun terakhir.



Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.5
Tren Kemakmuran Daerah per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun

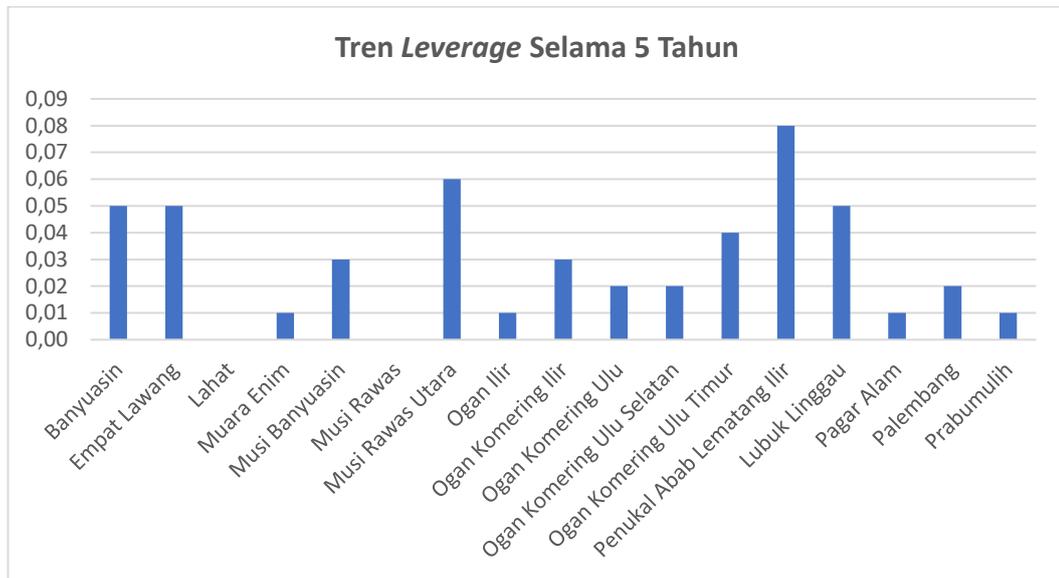


Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.6
Tren Kemakmuran Daerah per Tahun

Berdasarkan hasil penjelasan pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa rata-rata kemakmuran daerah selama periode 2019 hingga 2023, terdapat perbedaan yang cukup drastis antar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan kemakmuran daerah yang cukup tinggi, seperti Kota Palembang dengan rata-rata tertinggi (0,31), kemudian disusul oleh Kota Lubuk Linggau (0,11) dan Kabupaten Banyuasin (0,10). Sebaliknya, kabupaten/kota seperti Kabupaten Empat Lawang (0,04), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (0,04) dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (0,05) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi kemakmuran daerah selama lima tahun tersebut.

Pada gambar 4.6 kemakmuran daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat. Tahun 2019 mencatat sebesar 0,08, lalu masih sama seperti tahun 2019 sebesar 0,08 pada tahun 2020. Peningkatan tetap berlanjut pada tahun 2021 sebesar 0,09, kemudian sebesar 0,09 pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,10. Tren yang terus meningkat pada kemakmuran daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan selama lima tahun tersebut.



Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.7
Tren *Leverage* per Kabupaten/Kota Selama 5 Tahun



Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.8
Tren *Leverage* per Tahun

Berdasarkan hasil penjelasan pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa rata-rata *leverage* selama periode 2019 hingga 2023, terdapat perbedaan yang cukup drastis antar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa

kabupaten/kota menunjukkan *leverage* yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar (0,08), kemudian disusul oleh Kabupaten Musi Rawas Utara (0,06) dan Kota Lubuk Linggau (0,05). Sebaliknya, kabupaten/kota seperti Kabupaten Ogan Ilir (0,01), Kabupaten Lahat (0,00) dan Kabupaten Musi Rawas (0,00) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi utang selama lima tahun tersebut.

Pada gambar 4.8 *leverage* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat. Tahun 2019 mencatat sebesar 0,02, lalu sebesar 0,03 pada tahun 2020, pada tahun 2021 sebesar 0,03, kemudian sebesar 0,03 pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,04. Tren yang terus meningkat pada *leverage* menunjukkan bahwa utang dari masing-masing daerah juga mengalami peningkatan selama lima tahun tersebut.



Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.9
Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Kemandirian per Kabupaten/Kota
Selama 5 Tahun



Sumber : BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.10

Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Kemandirian per Tahun

Berdasarkan hasil penjelasan pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja keuangan dengan rasio efektivitas selama periode 2019 hingga 2023, hanya terdapat satu kabupaten/kota yang menunjukkan rasio kemandirian yang cukup tinggi, yaitu Kota Palembang dengan rata-rata tertinggi sebesar (54,20%), Sedangkan, kabupaten/kota seperti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (6,40%), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (5,60%), dan Kabupaten Empat Lawang (4,80%) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi ketergantungan selama lima tahun tersebut.

Pada gambar 4.10 kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat. Tahun 2019 mencatat sebesar 11,12%, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 11,65%, pada tahun 2021 masih sama seperti tahun 2020 sebesar 11,65%. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 sebesar 13,35% dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 13,88%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan semakin membaik selama lima tahun tersebut.

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 hingga 2023, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik data sampel penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sehingga memenuhi syarat dalam pemilihan sampel. Menurut Ghozali (2017) karakteristik data yang digambarkan dapat dilihat dari nilai *minimum* (terendah), *maximum* (tertinggi), nilai *mean* (rata-rata), dan *standard deviation* (standar deviasi) dari masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 17 kabupaten/kota dengan total 85 observasi selama periode 2019 hingga 2023. Hasil pengujian ini disajikan pada tabel statistik deskriptif dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.125412	1258.788	1206.741	0.091176	0.030000
Median	0.100000	1252.000	1205.000	0.080000	0.020000
Maximum	0.660000	1327.000	1249.000	0.430000	0.230000
Minimum	0.040000	1230.000	1174.000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.115610	22.62799	18.33235	0.072134	0.035153
Skewness	3.479481	1.483975	0.305833	2.908920	2.802064
Kurtosis	14.68853	4.806387	2.208376	11.70141	14.28027
Jarque-Bera	655.3814	42.75418	3.544519	388.0314	561.8880
Probability	0.000000	0.000000	0.169949	0.000000	0.000000
Sum	10.66000	106997.0	102573.0	7.750000	2.550000
Sum Sq. Dev.	1.122711	43010.19	28230.31	0.437082	0.103800
Observations	85	85	85	85	85

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.1 hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa:

Variabel dependen untuk Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diukur dengan Rasio Kemandirian dengan perbandingan Realisasi PAD dan Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kinerja Keuangan diperoleh nilai terendah sebesar 0,040 pada Kabupaten Empat Lawang tahun 2020 dan nilai tertinggi sebesar 0,660 pada Kota

Palembang tahun 2022, kemudian nilai rata-rata sebesar 0,125 serta nilai standar deviasinya sebesar 0,115.

Variabel independen untuk Ukuran Pemerintah Daerah (X1) diukur dengan Total Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ukuran Pemerintah Daerah diperoleh nilai terendah sebesar 1230,000 pada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 dan nilai tertinggi sebesar 1327,000 pada Kota Palembang tahun 2020, kemudian nilai rata-rata sebesar 1258,788 serta standar deviasinya sebesar 22,627.

Variabel independen untuk *Intergovernmental Revenue* (X2) diukur dengan Total Dana Perimbangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Intergovernmental Revenue* diperoleh nilai terendah sebesar 1174,000 pada Kota Pagar Alam tahun 2021 dan nilai tertinggi sebesar 1249,000 pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019, kemudian nilai rata-rata sebesar 1206,741 serta standar deviasinya sebesar 18,332.

Variabel independen untuk Kemakmuran Daerah (X3) diukur dengan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kemakmuran Daerah diperoleh nilai terendah sebesar 0,000 pada Kabupaten Muara Enim tahun 2020 dan nilai tertinggi sebesar 0,430 pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2022, kemudian nilai rata-rata sebesar 0,091 serta standar deviasinya sebesar 0,072.

Variabel independen untuk *Leverage* (X4) diukur dengan perbandingan Total Utang dan Total Ekuitas Dana pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Leverage* diperoleh nilai terendah sebesar 0,000 pada Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 dan nilai tertinggi sebesar 0,230 pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020, kemudian nilai rata-rata sebesar 0,030 serta standar deviasinya sebesar 0,035.

4.1.2 Analisis Pemilihan Model

Pemilihan model data panel terbagi menjadi tiga pendekatan yang digunakan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Ketiga pendekatan model harus dipilih salah satu yang paling tepat untuk

menginterpretasikan hasil analisis. Uji pemilihan model ini dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

4.1.2.1 Uji Pemilihan Model

4.1.2.1.1 Uji *Chow*

Uji *chow* merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara model pendekatan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Berikut ini disajikan hasil uji *chow*.

Tabel 4.2
Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.332801	(16,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	108.481790	16	0.0000

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji *chow* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* yaitu $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji *chow* pemilihan model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.1.2.1.2 Uji *Hausman*

Uji *hausman* merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara model pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi data panel. Berikut ini disajikan hasil uji *hausman*.

Tabel 4.3
Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.899792	4	0.0000

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* yaitu $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji *hausman* pemilihan model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.1.2.1.3 Uji *Lagrange Multiplier*

Ghozali (2017) mengemukakan bahwa *Lagrange Multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* metode *Ordinal Least Square* (OLS) yang paling tepat digunakan. Berikut ini disajikan hasil uji *lagrange multiplier*.

Tabel 4.4
Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	29.59011 (0.0000)	0.029411 (0.8638)	29.61952 (0.0000)
Honda	5.439680 (0.0000)	-0.171497 (0.5681)	3.725168 (0.0001)
King-Wu	5.439680 (0.0000)	-0.171497 (0.5681)	2.279307 (0.0113)
Standardized Honda	6.396967 (0.0000)	0.127334 (0.4493)	0.948960 (0.1713)
Standardized King-Wu	6.396967 (0.0000)	0.127334 (0.4493)	-0.170462 (0.5677)
Gourieroux, et al.	--	--	29.59011 (0.0000)

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Hasil dari uji *lagrange multiplier* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya pada uji *lagrange multiplier*, model yang terbaik dalam mengestimasi persamaan uji ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Pada pengambilan keputusannya, diperoleh bahwa berdasarkan uji *Chow*,

uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier* pemilihan model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.5
Kesimpulan Hasil Uji Pemilihan Model

Uji Model	Probabilitas	Kriteria	Model Terpilih
Uji <i>Chow</i>	0,0000	< 0,05	FEM
Uji <i>Hausman</i>	0,0000	< 0,05	FEM
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	0,0000	< 0,05	REM

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

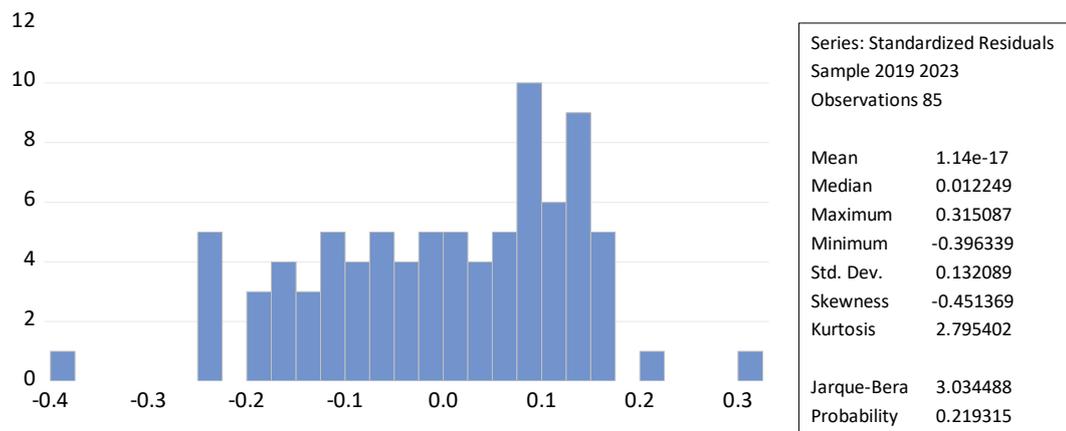
Berdasarkan ketiga pengujian diatas, penggunaan *Fixed Effect Model* terpilih sebanyak dua kali yaitu pada uji *Chow* dan uji *Hausman*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan model terbaik yang digunakan untuk menentukan pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi linier data panel dengan *Ordinary Least Square* (OLS) agar variabel independen tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut ini penjelasan untuk pengujian tersebut.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas.



Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Gambar 4.11
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.11 hasil yang diperoleh dari uji normalitas yaitu nilai probabilitas sebesar $0,2193 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas sudah terpenuhi.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji multikolinearitas antar variabel dapat diidentifikasi dengan menggunakan nilai korelasi antar variabel independen. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 05/29/25 Time: 10:11
Sample: 1 85
Included observations: 85

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.122095	5573.456	NA
X1	0.000496	19038.16	6.081964
X2	0.000496	17490.81	3.989849
X3	0.010013	6.143131	2.349579
X4	0.019830	1.893677	1.097613

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.6 hasil yang diperoleh dari uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa nilai $VIF < 10,00$ artinya data tidak terjadi masalah multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan apabila adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Berikut ini disajikan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.065433	Prob. F(4,80)	0.0931
Obs*R-squared	7.956417	Prob. Chi-Square(4)	0.0932
Scaled explained SS	8.063420	Prob. Chi-Square(4)	0.0893

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.7 hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-squared* sebesar $0,0932 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model yang tidak ada masalah autokorelasi. Berikut disajikan hasil dari uji autokorelasi pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/29/25 Time: 10:14
Sample: 1 85
Included observations: 85
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.309527	0.313347	-0.987809	0.3263
X1	0.022998	0.020100	1.144181	0.2560
X2	-0.012370	0.019753	-0.626205	0.5330
X3	-0.136527	0.092547	-1.475211	0.1442
X4	-0.027062	0.124855	-0.216749	0.8290
RESID(-1)	0.545824	0.117709	4.637070	0.0000
RESID(-2)	-0.053321	0.114202	-0.466902	0.6419
R-squared	0.247540	Mean dependent var	2.32E-15	
Adjusted R-squared	0.189659	S.D. dependent var	0.042112	
S.E. of regression	0.037908	Akaike info criterion	-3.628522	
Sum squared resid	0.112090	Schwarz criterion	-3.427363	
Log likelihood	161.2122	Hannan-Quinn criter.	-3.547610	
F-statistic	4.276670	Durbin-Watson stat	1.935004	
Prob(F-statistic)	0.000890			

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.8 maka hasil dari uji autokorelasi yaitu menggunakan nilai ($dU < DW < 4-dU$) yaitu ($1,7470 < 1,9350 < 2,253$), dapat disimpulkan bahwa nilai DW terletak diantara nilai dU dan nilai 4-dU. Artinya, data ini tidak terjadi masalah autokorelasi atau lolos uji autokorelasi dalam model regresi.

4.1.4 Analisis Model Terpilih

Berdasarkan hasil pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji chow dan uji hausman, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) untuk persamaan regresi linier data panel. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/29/25 Time: 08:52
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.024514	0.946323	0.025904	0.9794
X1	0.001904	0.000890	2.139857	0.0362
X2	-0.001916	0.000783	-2.447764	0.0171
X3	0.157733	0.075278	2.095345	0.0401
X4	0.040009	0.118273	0.338276	0.7363

Effects Specification

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.9 maka model estimasi yang diperoleh dari *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dituliskan sebagai berikut :

$$KK = 0,0245 + 0,0019 \text{ UPD} - 0,0019 \text{ IR} + 0,1577 \text{ KD} + 0,0400 \text{ L} + e$$

Hasil dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 0,0245 sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya variabel ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, kemakmuran daerah dan *leverage* maka variabel Kinerja Keuangan (KK) pemerintah daerah menyebabkan kenaikan sebesar 0,0245.
2. Nilai koefisien variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) sebesar 0,0019, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel ukuran pemerintah daerah mengalami peningkatan bernilai 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka variabel kinerja keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,0019.
3. Nilai koefisien variabel *Intergovernmental Revenue* (IR) sebesar -0,0019, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel *intergovernmental revenue* mengalami peningkatan bernilai 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka variabel kinerja keuangan mengalami penurunan sebesar -0,0019.

4. Nilai koefisien variabel Kemakmuran Daerah (KD) sebesar 0,1577, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel kemakmuran daerah mengalami peningkatan bernilai 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka variabel kinerja keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,1577.
5. Nilai koefisien variabel *Leverage (L)* sebesar 0,0400, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel *leverage* mengalami peningkatan bernilai 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka variabel kinerja keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,0400.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Uji koefisien determinasi adjusted (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menerangkan variabel. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 akan meningkat, tidak masalah apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil dari pengujian koefisien determinasi adjusted (R^2) dalam tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.022304	R-squared	0.962337
Mean dependent var	0.125412	Adjusted R-squared	0.950567
S.D. dependent var	0.115610	S.E. of regression	0.025704
Akaike info criterion	-4.273980	Sum squared resid	0.042285
Schwarz criterion	-3.670502	Log likelihood	202.6442
Hannan-Quinn criter.	-4.031244	F-statistic	81.76337
Durbin-Watson stat	1.706036	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa hasil Koefisien Determinasi Adjusted (R^2) yaitu sebesar 0,9505. Hal ini berarti 95,05% variabel dependen atau kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, kemakmuran daerah dan *leverage* dan hanya 4,95% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.1.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) dengan estimasi untuk regresi linier data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

4.1.6.1 Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Uji F dapat dilakukan dengan cara menggunakan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat nilai probabilitasnya. Hasil dari Uji F dapat dilihat dalam tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Uji F (Uji Simultan)

F-hitung	F-tabel	Probabilitas	Kriteria
81,76	2,49	0,0000	< 0,05

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh hasil dari Uji F dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai sebesar 81,76 sedangkan F_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,49. Artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X yaitu ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, kemakmuran daerah dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.1.6.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil (<) dari 0,05 (α) atau t_{hitung} lebih besar (>) t_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikansi $0,05/1 = 0,05$ (uji 1 sisi) dengan $df = n-k$ atau $85-5 = 80$, dan hasil yang diperoleh untuk T_{tabel} sebesar 1,9900. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variabel	t-tabel	t-hitung	Probabilitas	Kesimpulan
X1	1,9900	2,1398	0,0362	Berpengaruh
X2	1,9900	-2,4477	0,0171	Berpengaruh
X3	1,9900	2,0953	0,0401	Berpengaruh
X4	1,9900	0,3382	0,7363	Tidak Berpengaruh

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan tabel 4.12 hasil dari uji t atau uji parsial dapat disimpulkan bahwa :

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,1398 dan t_{tabel} sebesar 1,9900. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,1398 > 1,9900) dan nilai probabilitas (X1) $0,0362 < 0,05$. Dari hasil tersebut berarti bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Variabel *Intergovernmental Revenue* (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,4477 dan t_{tabel} sebesar 1,9900. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,4477 > 1,9900) dan nilai probabilitas (X2) $0,0171 < 0,05$. Dari hasil tersebut berarti bahwa variabel *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Variabel Kemakmuran Daerah (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,0953 dan t_{tabel} sebesar 1,9900. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,0953 > 1,9900) dan nilai probabilitas (X3) $0,0401 < 0,05$. Dari hasil tersebut berarti bahwa variabel Kemakmuran Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Variabel *Leverage* (X4) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,3382 dan t_{tabel} sebesar 1,9900. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,3382 < 1,9900$) dan nilai probabilitas (X4) $0,7363 > 0,05$. Dari hasil tersebut berarti bahwa variabel *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menguji berpengaruh tidaknya variabel Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.12 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,1398 > 1,9900$) dan nilai probabilitas ($X1$) $0,0362 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan H_1 dalam penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan aset yang besar, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, tuntutan terhadap kinerja yang baik akan meningkat seiring dengan besarnya aset. Berdasarkan penelitian ini, jumlah aset yang besar dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat atau lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran total aset untuk meningkatkan kinerja keuangan sudah berfungsi sebagaimana mestinya, karena dengan total aset semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berjalan lancar. Ukuran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diindikasikan dari total aset, menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan transportasi umum. Menurut Renas & Muid (2014) ukuran pemerintah daerah yang

besar akan memudahkan kegiatan operasional dan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan teori agensi, dimana pemerintah daerah (agen) yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan masyarakat (prinsipal). Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana total aset daerah memberikan pemerintah daerah kapasitas yang lebih baik untuk menjalankan fungsinya. Dengan total aset daerah yang besar, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018) peningkatan total aset daerah dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewanti, 2022; Prayuda & Arifin, 2024), dimana ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sunandar, 2023; Saraswati et al., 2024), dimana ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.2 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.12 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel *Intergovernmental Revenue* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,4477 > 1,9900$) dan nilai probabilitas (X^2) $0,0171 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan H_2 dalam penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima.

Salah satu sumber pendanaan daerah berasal dari dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam penggunaan dana perimbangan diharapkan agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar penggunaan dana perimbangan maka pemerintah daerah menunjukkan masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengurangi penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan pendapatan daerahnya, sehingga dengan dana perimbangan yang kecil pemerintah daerah dapat dikatakan mampu untuk membiayai segala kebutuhan pemerintahannya dan nantinya juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah maka dapat digunakan untuk meningkatkan program serta kegiatan pemerintahan (Dasmal et al., 2020).

Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan teori agensi, di mana pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan dana kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dikelola dalam rangka mendukung pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen mungkin tidak memiliki insentif yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, ketika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan, maka cenderung kurang berinovasi dalam mencari sumber pendapatan baru, yang pada akhirnya dapat menghambat kemandirian fiskal mereka. Selain itu, penggunaan dana perimbangan yang tidak efisien dapat terjadi, dimana agen (pemerintah daerah) tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal tersebut, sehingga berpotensi menyebabkan pemborosan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana perimbangan penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dan fokus terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardhana et al., 2024; Amin Insani et al., 2023), dimana *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aristy & Achyani, 2019; Dasmal et al., 2020), dimana *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.3 Pengaruh Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemakmuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.12 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel Kemakmuran Daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,0953 > 1,9900$) dan nilai probabilitas (X_3) $0,0401 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kemakmuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan H_3 dalam penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka tingkat kemakmuran daerah juga akan meningkat. Keterkaitan positif antara tingkat kemakmuran dan kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan cenderung menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan pemerintah di wilayah mereka, termasuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Besarnya tingkat kemakmuran akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang mana mencerminkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Menurut Aafiah Millenia (2022) “Peningkatan PAD merupakan hasil dari partisipasi angkatan kerja ekonomi makro. Pertumbuhan positif mendorong investasi sehingga secara bersamaan investasi akan mendorong peningkatan infrastruktur daerah. Infrastruktur yang baik dan investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah, peningkatan ini harus dibarengi

dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan tenaga kerja pemerintah daerah.”

Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan teori agensi, dimana pemerintah daerah (agen) yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan masyarakat (prinsipal). Dalam penelitian ini, kemakmuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang mensejahterahkan masyarakat dan infrastruktur. Peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur yang memadai (Aafiah Millenia, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemakmuran daerah, sehingga dapat menciptakan siklus positif yang mendukung kinerja keuangan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iswantini et al., 2021; Aafiah Millenia, 2022), dimana kemakmuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andani et al., 2019; Aristy & Achyani, 2019), dimana kemakmuran daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.12 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel *Leverage* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,3382 dan t_{tabel} sebesar 1,9900. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,3382 < 1,9900$) dan nilai probabilitas ($X4$) $0,7363 > 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Leverage* tidak berpengaruh

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan H_4 dalam penelitian ini yaitu H_0 diterima dan H_a ditolak.

Leverage berkaitan dengan penggunaan aktiva atau dana, dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap. *Leverage* juga memberikan gambaran struktur modal sehingga terlihat tingkat risiko tidak tertagihnya utang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki *leverage* yang tinggi dan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena sumber pendanaan terbesarnya berasal dari pihak eksternal. Semakin rendah *leverage*, maka semakin rendah pula ketergantungan entitas pada pihak luar. Dengan demikian, pemerintah daerah harus bisa mengendalikan utang daerahnya serta mampu membayar dan menyelesaikan utang daerahnya masing-masing. Sehingga, daerah tersebut dapat mendanai operasional mereka tanpa memerlukan pinjaman dari pihak luar. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin buruk kinerja, sebaliknya jika semakin rendah *leverage* maka semakin baik kinerja (Manafe et al., 2023).

Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan teori agensi, dimana pemerintah daerah (agen) yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan masyarakat (prinsipal). Dalam penelitian ini, *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki *leverage* yang tinggi, yang berarti bahwa sebagian besar sumber pendanaan mereka berasal dari pihak eksternal. Pemerintah daerah perlu mengendalikan utang tersebut. Dengan mengurangi ketergantungan pada utang, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam pengelolaan utang dan sumber daya keuangan, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai agen yang bertanggung jawab dan memenuhi ekspektasi masyarakat (Prayuda & Arifin, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati, 2024; Saputra, 2024), dimana *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Fauziah et al., 2023; Manafe et al., 2023) dimana *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama atau simultan dengan melakukan uji F, bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai sebesar 81,76 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Sedangkan nilai F_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,49. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $81,76 > 2,49$ dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu $0,0000 < 0,05$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang artinya hipotesis H_5 diterima maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, kemakmuran daerah dan *leverage* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil dari perhitungan koefisien determinasi pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa R-squared memiliki nilai sebesar 0,9505. Hal ini artinya persentase pengaruh variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 95,05% atau hanya 4,95% pengaruh dari variabel lain diluar variabel penelitian yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, kemakmuran daerah dan *leverage* akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 hingga 2023.

Dalam perspektif teori agensi, temuan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah sebagai agen dari pemerintah pusat (prinsipal).

Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi anggaran, tetapi juga harus menunjukkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Ketika seluruh variabel tersebut saling mendukung, maka peran daerah sebagai agen dapat berjalan lebih optimal, sehingga tujuan fiskal yang ditetapkan oleh pusat dapat tercapai dengan lebih baik. Ini sekaligus mencerminkan perlunya pengawasan yang efektif dari pusat serta insentif yang mendorong daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri dan bertanggung jawab.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar total aset daerah maka semakin tinggi ukuran pemerintah daerah dan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Variabel *Intergovernmental Revenue* (X2) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *intergovernmental revenue* meningkat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Variabel Kemakmuran Daerah (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini mengindikasikan meningkatnya PAD sehingga kemakmuran daerah juga mengalami peningkatan serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Variabel *Leverage* (X4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan karena tingginya *leverage* sehingga belum dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

5. Berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa variabel X yaitu ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, kemakmuran daerah dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y yaitu kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis mengemukakan beberapa saran dan keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Saran

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan aset daerah yang dimiliki untuk memberikan pelayanan publik secara optimal.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengurangi penggunaan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
3. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan untuk menggali sumber-sumber pendapatan, terutama pendapatan asli daerah serta menggunakan sumber daya alam dan potensi yang ada dengan sebaik mungkin.
4. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan untuk mengurangi ketergantungan entitas dari pihak luar serta mampu mengendalikan utang daerahnya.

5.2.2 Keterbatasan Penelitian

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah variabel lain untuk mengetahui faktor ekonomi maupun faktor sosial yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti pendapatan asli daerah, belanja modal dan kualitas sumber daya manusia serta menambah tahun penelitian agar diperoleh hasil yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803. *Politeknik Negeri Sriwijaya*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Amin Insani, Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. *Universitas Mataram*. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. *Universitas Bengkulu*. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Ardhana, R. L., Suhendro, S., & Kuriniati, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 4639–4647. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung*. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9051>
- Ardiami, K. P., & Ivana Ardelia Rhomandhonna. (2023). Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 423–438. *Universitas Islam Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art10>
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 833. *Universitas Surya Kencana*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>
- Aristy, T., & Achyani, F. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah). *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper, September*, 710–721. *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Asmaul, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86-101. *Universitas Islam Majapahit Mojekerto*. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>.

- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 584-598. Universitas Islam Indonesia.
- Azzahro, N. A., Murhaban, M., Ikhyanuddin, I., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(4), 577. *Univesitas Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i4.11284>.
- Bernardin, D. E. Y., Agustina, W. D., & Fitria, Y. Z. N. (2023). Kinerja Keuangan Daerah: Penerimaan Pad (Pendapatan Asli Daerah). *Jurnal Financia*, 4(2), 92–103. *Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya*. <https://doi.org/10.51977/financia.v4i2.1291>
- BPK-RI.2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019*
- BPK-RI.2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*
- BPK-RI.2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021*
- BPK-RI.2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022*
- BPK-RI.2024. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023*
- Chilly Bella Tiara Sedek, S., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, 4, 9081–9100. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39. *Universitas Riau*. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788>

- Desky, D. A., Erlina, E., & Sirozuzilam, S. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Trias Politika*, 7(1), 47–60. *Universitas Sumatera Utara*. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i1.5064>
- Dewanti, A. C. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2016-2020. *Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–91. *Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong*. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v1i1.1404>
- Dwi Agustina Iswantini, Agung Hirmanto, & Rita Natalia. (2021). Pajak Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 38 No. 1, 32–45. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH. Dahlan Lamongan*.
- Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, & Salma Putri Mellinia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384. *Universitas Jendral Soedirman*. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422>
- Faud, R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Badan Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fauziah, N. N., Zakaria, S., & Yunita, D. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Administrasi ...*, 3(November), 368–377. *Universitas Padjajaran*. <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/download/52905/22062>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung*. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilmiyyah, N. M., & Dewata, E. (2017). *Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Indonesia*. 5(1), 147-162. *Politeknik Negeri Sriwijaya*.

- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Econometric Nature of the firm: A Reader, Third Edition*, 283-303.
- Manafe, H. A., Sia Niha, S., & Putu S. Putra, D. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547. *Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1322>
- Mulyani, E. S., Sudarman, S., & Astuti, R. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020. *Educational Studies: Conference Series*, 1(2), 1–10. *Universitas Mulawarman*. <https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.894>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat)*. UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Novianti, M. (2022). *Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020) Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang*.
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance (NCAF)*, 6, 77–87. *Universitas Islam Indonesia*.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–2082. *Universitas Jambi*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>
- Rasyidi, M. A. (2020). Tata Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11, 89-118. *Universitas Surya Darma*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/396>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Salsabila, S., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Wealth, Leverage Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 1-9. Universitas Telkom Bandung.
- Saraswati, S. A., Inayati, N. I., Setyadi, E. J., & Dirgantari, N. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan : Bukti Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan DIY Tahun 2020- 2022 Financial Performance Analysis : Empirical Evidence In. 10, 275–293. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung.*
- Sari, I.P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). 3. *Universitas Islam Indonesia.*
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. *Universitas Negeri Yogyakarta.* <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Sugiyanto. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews. In Academica Publication.*
- Sunandar, A. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017-2021. Universitas Islam Indonesia.*
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166. *STAI UISU Pematangsiantar.*
- Wahyudi, A., Permadi, R. N., & Zakiyah, S. (2020). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Orde Baru: Praktek dan Implikasinya. *In Digital Repository Universitas Jember (Issue January). Universitas Jember.*

- Wardani, A. K., Ariani, K. R., Surakarta, U. M., & Surakarta, U. M. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Kemandirian Daerah , Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah T. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1, 575–584. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wulandari, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 411–420. *Universitas Pamulang*. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i2.303>
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 7(1), 11-21. *Universitas Islam `45 Bekasi*.
- Zikral, Z., Kusumastuti, R., & Zulma, G. W. M. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 110–118. *Universitas Jambi*. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2159>

LAMPIRAN

Lampiran 1



Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Ideta Adelia Rahmadi
NIM : 062140510375
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D4 Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak
NIP : 197804102005012020
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D4 Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Jumat tanggal 07 Maret 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Skripsi. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Jumat pukul 13.00 WIB s/d selesai bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya. Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Skripsi.

Pihak Pertama

Palembang, 07 Maret 2025

Pihak Kedua



Ideta Adelia Rahmadi
NIM. 062140510375



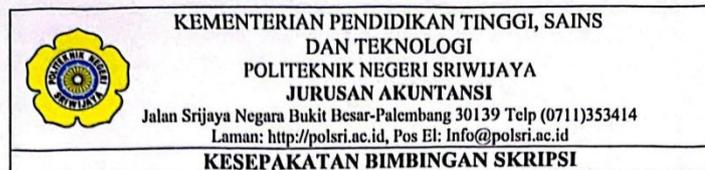
Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197804102005012020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197104121998022001

Lampiran 2



Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Ideta Adelia Rahmadi
NIM : 062140510375
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D4 Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak
NIP : 197007182001121001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D4 Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Senin tanggal 10 Maret 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Skripsi. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin pukul 10.00 WIB s/d selesai bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya. Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Skripsi.

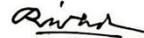
Pihak Pertama



Ideta Adelia Rahmadi
NIM. 062140510375

Palembang, 10 Maret 2025

Pihak Kedua



Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak
NIP. 197007182001121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197104121998022001

Lampiran 3

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA JURUSAN AKUNTANSI Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 353414 Laman: http://polsri.ac.id, Pos El : info@polsri.ac.id</p>
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ideta Adelia Rahmadi
 NIM : 062140510375
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*,
 Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan
 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
 Pembimbing I : Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	07 Maret 2025	Pengajuan Judul	M
2.	11 Maret 2025	ACC Judul	M M
3.	19 Maret 2025	Langut Proposal	M
4.	21 Maret 2025	Revisi Proposal	M
5.	11 April 2025	Revisi Proposal	M
6.	17 April 2025	Revisi Proposal	M
7.	22 April 2025	ACC Proposal Skripsi	M
8.	16 Mei 2025	Revisi BAB I, ii dan iii	M
9.	23 Mei 2025	ACC BAB I, ii dan iii	M
10.	04 Juni 2025	Revisi BAB IV	M
11.	23 Juni 2025	Revisi BAB IV dan V	M
12.	30 Juni 2025	Acc Bab IV & V	M
13.			

Palembang, 2025
 Ketua Jurusan



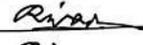
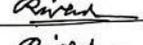
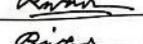
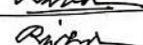
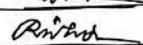
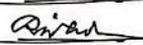
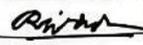
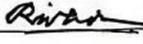

 Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP 197104121998022001



Lampiran 4

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA JURUSAN AKUNTANSI Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpun (0711) 353414 Laman: http://polsri.ac.id, Pos El : info@polsri.ac.id</p>
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ideta Adelia Rahmadi
 NIM : 062140510375
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*,
 Kemakmuran Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan
 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
 Pembimbing II : Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	07 Maret 2025	Pengajuan Judul	
2.	11 Maret 2025	ACC Judul	
3.	18 Maret 2025	Lanjut Proposal, Revisi	
4.	11 April 2025	ACC Proposal Skripsi	
5.	07 Mei 2025	Pengajuan BAB I dan BAB II	
6.	28 Mei 2025	ACC BAB I dan BAB II	
7.	11 Juni 2025	Pengajuan BAB III dan BAB IV	
8.	23 Juni 2025	ACC BAB III dan BAB IV	
9.	30 Juni 2025	ACC BAB V dan keseluruhan	
10.			
11.			
12.			
13.			

Palembang, 2025
 Ketua Jurusan



Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP 197104121998022001



Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon 0711-353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3400/PL.6.3.1/SP/2025
Perihal : Izin Pengambilan Data

11 April 2025

Yth. Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.31
Jakarta Pusat 10210

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Program Sarjana Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, Skripsi merupakan mata kuliah wajib pada semester 8 (delapan). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penulisan skripsi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Ideta Adelia Rahmadi	0621 4051 0375	8 AP.A	Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


a.n. Direktur
Wakil Direktur I,
Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd.
NIP.197707052006041001

Tembusan :
1. Ketua Jurusan Akuntansi
2. Yang bersangkutan

Ms.Word/F/AD/Dw



Lampiran 6

Lampiran Hasil *Output* EViews 12

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.125412	1258.788	1206.741	0.091176	0.030000
Median	0.100000	1252.000	1205.000	0.080000	0.020000
Maximum	0.660000	1327.000	1249.000	0.430000	0.230000
Minimum	0.040000	1230.000	1174.000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.115610	22.62799	18.33235	0.072134	0.035153
Skewness	3.479481	1.483975	0.305833	2.908920	2.802064
Kurtosis	14.68853	4.806387	2.208376	11.70141	14.28027
Jarque-Bera Probability	655.3814	42.75418	3.544519	388.0314	561.8880
	0.000000	0.000000	0.169949	0.000000	0.000000
Sum	10.66000	106997.0	102573.0	7.750000	2.550000
Sum Sq. Dev.	1.122711	43010.19	28230.31	0.437082	0.103800
Observations	85	85	85	85	85

Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.332801	(16,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	108.481790	16	0.0000

Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

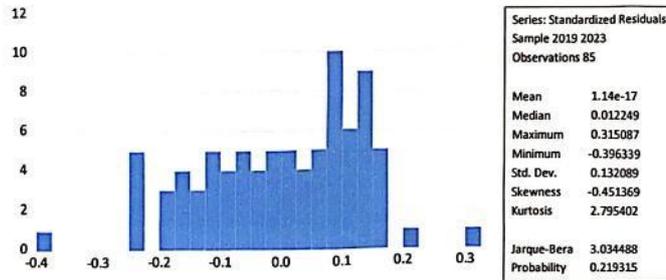
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.899792	4	0.0000

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	29.59011 (0.0000)	0.029411 (0.8638)	29.61952 (0.0000)
Honda	5.439680 (0.0000)	-0.171497 (0.5681)	3.725168 (0.0001)
King-Wu	5.439680 (0.0000)	-0.171497 (0.5681)	2.279307 (0.0113)
Standardized Honda	6.396967 (0.0000)	0.127334 (0.4493)	0.948960 (0.1713)
Standardized King-Wu	6.396967 (0.0000)	0.127334 (0.4493)	-0.170462 (0.5677)
Gourieroux, et al.	--	--	29.59011 (0.0000)

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 05/29/25 Time: 10:11
Sample: 1 85
Included observations: 85

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.122095	5573.456	NA
X1	0.000496	19038.16	6.081964
X2	0.000496	17490.81	3.989849
X3	0.010013	6.143131	2.349579
X4	0.019830	1.893677	1.097613

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.065433	Prob. F(4,80)	0.0931
Obs*R-squared	7.956417	Prob. Chi-Square(4)	0.0932
Scaled explained SS	8.063420	Prob. Chi-Square(4)	0.0893

Hasil Uji Autokorelasi

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/29/25 Time: 10:14
Sample: 1 85
Included observations: 85
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.309527	0.313347	-0.987809	0.3263
X1	0.022998	0.020100	1.144181	0.2560
X2	-0.012370	0.019753	-0.626205	0.5330
X3	-0.136527	0.092547	-1.475211	0.1442
X4	-0.027062	0.124855	-0.216749	0.8290
RESID(-1)	0.545824	0.117709	4.637070	0.0000
RESID(-2)	-0.053321	0.114202	-0.466902	0.6419

R-squared	0.247540	Mean dependent var	2.32E-15
Adjusted R-squared	0.189659	S.D. dependent var	0.042112
S.E. of regression	0.037908	Akaike info criterion	-3.628522
Sum squared resid	0.112090	Schwarz criterion	-3.427363
Log likelihood	161.2122	Hannan-Quinn criter.	-3.547610
F-statistic	4.276670	Durbin-Watson stat	1.935004
Prob(F-statistic)	0.000890		

Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.022304	R-squared	0.962337
Mean dependent var	0.125412	Adjusted R-squared	0.950567
S.D. dependent var	0.115610	S.E. of regression	0.025704
Akaike info criterion	-4.273980	Sum squared resid	0.042285
Schwarz criterion	-3.670502	Log likelihood	202.6442
Hannan-Quinn criter.	-4.031244	F-statistic	81.76337
Durbin-Watson stat	1.706036	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil Uji F (Uji Simultan)

F-hitung	F-tabel	Probabilitas	Kriteria
81,76	2,49	0,0000	< 0,05

Hasil Uji T (Uji Parsial)

Variabel	T-tabel	T-hitung	Probabilitas	Kesimpulan
X1	1,9900	2,1398	0,0362	Berpengaruh
X2	1,9900	-2,4477	0,0171	Berpengaruh
X3	1,9900	2,0953	0,0401	Berpengaruh
X4	1,9900	0,3382	0,7363	Tidak Berpengaruh

Lampiran 7

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78